

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Tinjauan Literatur**

Untuk menunjukkan penguasaan terhadap topik penelitian yang diteliti penulis menggunakan beberapa sumber literatur yang dapat mendukung pernyataan dan studi kasus dalam penelitian ini. Berikut adalah temuan dari studi sebelumnya dan konsep-konsep teori yang relevan dengan area penelitian yang difokuskan:

*Literature review* pertama yang ditulis oleh Hanbum Cho (2002) dalam penelitian yang berjudul, *NGOs and Inter-Korean Socio-Cultural Exchanges and Cooperation* menyoroti peran penting Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam memfasilitasi pertukaran sosial-budaya antara Korea Selatan dan Korea Utara. LSM seperti *Korean Sharing Movement* dan *Beautiful Foundation* mengorganisir program-program seperti pertukaran pelajar dan proyek kolaboratif seni, yang bertujuan membangun kepercayaan dan mengurangi prasangka. Kebijakan pemerintah, seperti kebijakan *sunshine policy* memberikan kerangka kerja yang mendukung inisiatif ini, meskipun tantangan politik dan birokrasi tetap ada. Studi kasus menunjukkan keberhasilan program LSM dalam meningkatkan pemahaman dan dialog antara warga sipil kedua negara, menekankan pentingnya diplomasi warga sipil dalam mempromosikan perdamaian dan kerja sama lintas batas. Penelitian ini memberikan wawasan berharga tentang kontribusi LSM dalam upaya resolusi konflik antar-Korea.

Kedua, kajian yang ditulis oleh Michael Schluter dan Jeremy Ive (2018), yang berjudul *A Relational Approach to Peacebuilding in the Korean Peninsula*. Studi ini membahas sebuah pendekatan relasional untuk membangun perdamaian di semenanjung Korea, dengan menekankan keharmonisan dan kedekatan dalam hubungan pribadi dan organisasi. Penulis juga mengusulkan proses diplomatik "jalur kedua", yang mirip dengan inisiatif yang berhasil di dijalankan di Afrika Selatan dan Sudan. Penulis melihat dengan membangun visi bersama antara Korea Utara dan Korea Selatan dapat mengurangi ketegangan, meningkatkan kepercayaan, dan mendorong perdamaian jangka panjang. Dengan memprioritaskan interaksi sosial, pendekatan ini

sesuai dengan nilai-nilai budaya Korea dan dapat membuka peluang untuk mengembangkan lembaga-lembaga baru yang menyatukan semua pihak. Dengan menerapkan pendekatan "*Track Two*", artikel ini menggambarkan sebuah studi kasus yang sama dengan periode transisi menuju akhir rezim apartheid di Afrika Selatan dan juga memberikan kontribusi dalam penyelesaian konflik antara Sudan Utara dan Selatan sebelum tercapainya Perjanjian Naivasha 2005.

Ketiga, penelitian yang ditulis oleh John A. Johnson dan George Vitale (2018), yang berjudul *Taekwondo diplomacy: new possibilities for peace on the Korean Peninsula*. Dalam penelitian ini penulis membahas bagaimana organisasi taekwondo yang berasal dari Korea Selatan dan Korea Utara berperan sebagai aktor diplomasi bagi kedua negara. Upaya soft-diplomacy, yang dilakukan oleh WT atau ITF, menunjukkan pengaruh luas dalam keberhasilannya menuju perdamaian antara Korea Selatan dan DPRK melalui berbagai demonstrasi bersama. Fokus utama dari penelitian ini yaitu untuk memberikan pandangan baru bagi upaya diplomatik olahraga yang dapat dilakukan oleh kedua Korea dan organisasi Taekwondo terkait mereka di masa depan. Penulis juga berharap bahwa penelitian ini dapat menjadi salah satu faktor pendorong dalam usaha membawa perdamaian ke Korea.

Keempat, studi yang ditulis oleh Philip Arthur Herdinata (2019), yang berjudul *Pyeongchang Olympics as The Peace Instrument to Encourage the Reconciliation in Korean Peninsula*. Penelitian ini membahas bagaimana Olimpiade Musim Dingin ke-23 telah memainkan peran dalam menyatukan kedua Korea. Fakta bahwa kedua Korea berpartisipasi bersama di bawah Bendera Unifikasi memberikan narasi positif kepada dunia. Dalam penelitian ini menerapkan konsep *Multitrack Diplomacy* yang menunjukkan bahwa ada beberapa pendekatan yang dapat digunakan untuk mencapai perdamaian antara kedua Korea. Ini akan memberikan ruang yang lebih luas bagi interaksi dan pembangunan nilai-nilai perdamaian, serta membuka peluang untuk pertemuan tinggi antara Korea. Olimpiade Musim Dingin ke-23 dianggap sebagai instrumen untuk mendorong rekonsiliasi di Semenanjung Korea. Penelitian ini melihat bahwa Olimpiade Pyeongchang dapat menjadi sebuah diplomasi yang baik untuk setidaknya mengurangi ketegangan antara dua Korea.

Kelima, penelitian yang ditulis oleh Niklas Swanström (2020), yang berjudul *The Case for Multilateralism: The Korean Peninsula in a Regional Context*. Penelitian ini membahas bagaimana ketidakefektifan diplomasi bilateral dalam mencapai perdamaian di Semenanjung Korea. Melalui kerangka keamanan regional yang lebih luas penulis melihat konflik regional yang terjadi di semenanjung Korea memerlukan perpaduan proses multilateral untuk mencapai perdamaian dan stabilitas jangka panjang di semenanjung Korea. Multilateralisme sangat penting untuk mengatasi medan geopolitik yang rumit dan menjembatani berbagai kepentingan di Asia Timur Laut. Meskipun, implementasinya mungkin akan memakan waktu yang panjang. Penelitian ini membuktikan bahwa, secara ideal multilateral dapat membangun keseimbangan baru di wilayah ini melalui kerangka kerja bilateral. Namun, kedua pendekatan tersebut harus diselaraskan satu sama lain dan mempertimbangkan kepentingan yang terfragmentasi dari berbagai aktor yang membentuk lanskap politik di Asia Timur Laut. Upaya diplomatik harus menggunakan struktur internasional untuk mendorong perdamaian, stabilitas, dan kemajuan di Asia Timur Laut.

Keenam, Penelitian yang ditulis oleh Alec Forss (2020), yang berjudul *A People's Peace: Inclusive Peacebuilding and the Role of Civil Society in Korea*. Penelitian ini berfokus pada bagaimana konsep pembangunan perdamaian yang inklusif diterapkan di Semenanjung Korea, dengan penekanan khusus pada peran masyarakat sipil Korea Selatan. Penelitian ini juga menguraikan betapa pentingnya meningkatkan partisipasi kelompok non-pemerintah dalam proses perdamaian di Korea dan meninjau berbagai organisasi masyarakat sipil Korea Selatan dan pendekatan yang mereka gunakan. Tidak hanya itu, Penelitian ini meninjau upaya pemerintah Moon Jae-in untuk mendorong inklusivitas serta kendala yang dihadapinya. Penulis menegaskan bahwa pembangunan perdamaian yang inklusif di Semenanjung Korea sangat penting, sehingga warga sipil harus lebih terlibat dalam proses perdamaian dan menghadapi tantangan dan peluang yang terkait dengan hal ini. Selain itu, penelitian ini meninjau upaya pemerintah Moon Jae-in untuk meningkatkan inklusivitas dan konsensus terkait kebijakan Korea Utara, sambil mempertimbangkan cara masyarakat dapat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan.

Penelitian ketujuh yang ditulis oleh Pekka Korhonen dan Tomoomi Mori (2020), yang berjudul *The Samjiyon Orchestra as a North Korean Means for Gender Based Cultural Diplomacy*. Penelitian ini membahas tentang bagaimana peran Orkestra Samjiyon sebagai alat diplomasi budaya Korea Utara, Orkestra Samjiyon memainkan peran penting selama Olimpiade Musim Dingin Pyeongchang 2018. Selama Olimpiade Musim Dingin Pyeongchang 2018, orkestra Samjiyon memainkan peran penting. Orkestra ini bertujuan untuk mendorong kesetaraan gender dan meningkatkan citra Korea Utara di mata dunia. Penampilan orchestra berlangsung di Gangneung, Seoul, acara ini melibatkan Korea Selatan dan Tiongkok. Acara ini menjadi pertemuan puncak antara Moon Jae-in dan Kim Jong-un, dan menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap inisiatif diplomatik kedua negara.

Jurnal artikel kedelapan yang ditulis oleh Organisasi non- Pemerintah yang bernama Hanns Seidel Foundation (HSF) (2020), yang berjudul *Environmental Cooperation as a Peacebuilding Effort on the Korean Peninsula: A Case Study of Wetland and Migratory Bird Collaboration between South and North Korea*. Artikel ini membahas bagaimana proyek kerja sama yang berfokus pada habitat burung migran dan ekosistem lahan basah dapat menangani masalah lingkungan yang mendesak dan mendorong percakapan juga kepercayaan antara dua negara. Kegiatan yang didanai oleh organisasi non-pemerintah, Hanns Seidel Foundation (HSF) telah menyediakan program seperti seminar, penelitian lapangan, dan proyek konservasi yang melibatkan pemangku kepentingan lokal juga masyarakat lokal. Kegiatan ini mampu memberikan keuntungan potensial dari kerja sama sektor lingkungan seperti membangun kepercayaan dan membangun jalur komunikasi yang menawarkan banyak peluang bagi kedua negara. Meskipun masalah seperti ketegangan politik dan ketidaksesuaian dalam kerangka regulasi terus muncul, Korea Selatan dan Korea Utara telah bekerja sama dalam hal lingkungan untuk mencapai perdamaian di Semenanjung Korea. Kesuksesan kerja sama ini dapat digunakan sebagai model untuk aktivitas antar-Korea lainnya dan membuktikan bahwa perdamaian dapat dicapai melalui pengelolaan lingkungan.

Kesembilan, Penelitian yang ditulis oleh Kadir Jun Ayhan dan Siyeon Jang (2022), yang berjudul *Inter-Korean People-to-People Diplomacy: Social and Cultural*

*Exchanges across the 38th Parallel.* Menganalisis hasil pertukaran antar-Korea di tingkat individu, termasuk perubahan dalam persepsi kognitif (pemahaman) dan afektif (emosional) dari para peserta Korea Selatan terhadap Korea Utara dan Korea Utara. Penelitian ini juga meneliti perbedaan persepsi antara peserta Korea Selatan dan Korea Utara, serta peran acara informal dalam memfasilitasi percakapan yang tulus dan akrab, juga tantangan dalam pertukaran, dan sifat non-politik. Penulis menekankan betapa pentingnya berbicara langsung tentang pengalaman pribadi, mengkategorisasi ulang identitas, dan membangun kepercayaan dan empati di antara masyarakat yang bermusuhan. Selain itu, jurnal ini memberikan wawasan dan perspektif dari para pejabat tinggi Kementerian Unifikasi dan para peserta dari Korea Selatan, dalam menangani masalah unifikasi, strategi intervensi, metode pertukaran, dan hasil yang diharapkan.

Kesepuluh, Penelitian yang ditulis oleh Kadir Jun Ayhan, Sejung Park, Lindsey M. Bier, Han Woo Park (2022), yang berjudul *What are the Consequences of the Social and Cultural Exchanges between the Two Koreas? Insights from an Experimental Study on the Effect of Superordinate Korean Identity*. Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana hasil dari pertukaran sosial dan budaya antara Korea Utara dan Korea Selatan, yang secara khusus berfokus pada efek dari identitas Korea yang lebih tinggi terhadap humanisasi, empati, dan perasaan negatif terhadap orang Korea Utara. Dengan menggunakan desain penelitian eksperimental penelitian ini menentukan apakah peserta yang terlibat dalam program pertukaran antar-Korea memberikan sebuah kesempatan baru untuk memahami efek dari kegiatan diplomasi individu ke individu dan dapat mengurangi pandangan negatif tentang Korea Utara. Para penulis juga mengidentifikasi apakah superordinat (identitas bersama) dapat mendukung koneksi dan persatuan interpersonal. Penelitian ini berkontribusi pada pemahaman tentang bagaimana interaksi langsung antar-individu dapat mempengaruhi dinamika sosial dan politik, serta memperkuat upaya untuk menciptakan perdamaian dan persatuan di Semenanjung Korea.

Kesebelas, Penelitian yang ditulis oleh Michael S. Baker dan Jacob B. Baker (2022), yang berjudul *It's Been "Groundhog Day" On the Korean Peninsula for Over 70 Years*. Penelitian ini mengusulkan cara baru untuk menyelesaikan masalah

Semenanjung Korea adalah dengan mengganti sanksi dengan diplomasi, perdagangan, dan kolaborasi budaya. Metode ini melibatkan respons kemanusiaan yang serupa dengan *Marshall Plan*, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup orang Korea Utara dan mendorong rekonsiliasi antara kedua Korea. Studi ini menekankan bahwa perlu adanya dorongan dari Amerika Serikat dan Cina dalam memberikan dukungan untuk keputusan tunggal rakyat Korea sambil mengakui konflik dan ketegangan militer saat ini. Penulis juga mengatakan bahwa strategi konvensional tidak berhasil, maka dibutuhkan perubahan mendesak untuk mencegah perang dan langkah-langkah pencegahan untuk menghindari eskalasi konflik.

Keduabelas, Penelitian yang ditulis oleh Gil-soo Han (2023), yang berjudul ***Chapter Title: Taking a Free Ride on the Reunification Train Grassroots' Cost-Benefit Nationalism***. Pada penelitian ini penulis menganalisis laporan media dan narasi mengapa orang Korea semakin acuh tak acuh, atau tidak tertarik, dalam kemungkinan penyatuan kembali mengenai biaya penyatuan kembali. Yang mana, pendanaan dan dukungan masyarakat menjadi pembahasan utama dalam penelitian ini. Penulis menegaskan bahwa mempersiapkan dana yang memadai untuk mendukung reunifikasi sangat penting. Namun, persiapan visi dan dorongan yang jelas dari tingkat masyarakat menjadi hal yang krusial dalam proses reunifikasi kedua negara. Diplomasi orang-ke-orang antara Korea Utara dan Korea Selatan masih terbatas, yang menghambat upaya untuk membangun hubungan yang lebih erat dan saling pengertian di antara warga kedua negara. Selain itu, terdapat pembagian ideologis yang mendalam di Korea Selatan mengenai pandangan terhadap Korea Utara dan prospek reunifikasi, yang mengakibatkan kesulitan dalam mencapai konsensus nasional yang luas. Oleh karena itu, penulis menyarankan Reunifikasi Korea memerlukan upaya bersama yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan partisipasi aktif masyarakat sipil untuk mengatasi perbedaan ideologis dan membangun dasar bersama untuk perdamaian yang berkelanjutan.

Perbandingan dari keduabelas artikel di atas dengan penelitian ini, dapat dilihat dari segi persamaannya, dimana dari keduabelas kajian penelitian secara umum membahas mengenai konflik regional yang terjadi antara dua Korea yang membutuhkan

penyelesaian yang lebih komprehensif dan melibatkannya berbagai tingkatan atau aktor yang terkandung dalam *multi track diplomacy* termasuk peran *private citizen* agar menghasilkan penyelesaian jangka panjang. Disisi lain, perbedaan dari keduabelas penelitian sebelumnya dengan penelitian ini dapat dilihat dari sudut pandang penelitian, yang mana pendekatan *private citizen* menjadi sudut pandang yang difokuskan dalam penelitian ini. Sedangkan, sudut pandang dari keduabelas penelitian sebelumnya memiliki perbedaan pandangan antara satu dan lainnya.

**Tabel 2.1. 1 Tinjauan Literatur**

| No | Judul Literatur   | Penulis, Tahun   | Persamaan   | Perbedaan  |
|----|---|------------------|---|--|
| 1  | <i>NGOs And Inter-Korean Socio-Cultural Exchanges and Cooperation</i> | Hanbum Cho, 2002 | Kesamaan yang ditemukan dalam penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Hanbum Cho menyoroti bagaimana peran warga sipil dan kontribusi LSM, dimana aktor non-negara dapat memainkan peran krusial dalam mempromosikan perdamaian dan kerja sama lintas batas. Diplomasi warga sipil, yang didorong oleh inisiatif LSM, dapat menjadi pelengkap yang sangat efektif bagi diplomasi tradisional yang dilakukan oleh negara. Keterlibatan masyarakat dan NGO | Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang ditulis oleh Hanbum Cho, terletak pada pendekatan untuk mencapai hubungan damai antar dua Korea. Dimana peran funding/pendanaan menjadi fokus utama (track VIII). Sedangkan dalam penelitian ini akan membahas bagaimana pendekatan track IV dalam konsep <i>multi track diplomacy</i> dapat menjadi pendekatan yang strategis dalam menciptakan perdamaian di kedua Korea. |

|   |  |   |   |  |
|---|--|---|---|--|
|   |  |   |   | dalam penelitian ini termasuk kedalam cakupan jalur IV dalam konsep diplomasi <i>multi track</i> .   |
| 2 | <i>A Relational Approach to Peacebuilding in the Korean Peninsula</i>            | Michael Schluter, Jeremy Ive, 2018      | Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang ditulis oleh Michael Schluter, menggarisbawahi bahwa LSM, Budaya, dan sektor lainnya membantu merangsang perdamaian di semenanjung Korea                              | Penelitian ini berbeda dengan penelitian Michael Schluter karena penelitian ini tidak hanya akan berfokus pada konsep "jalur kedua". Tetapi, akan terfokus terhadap peran warga sipil (track IV) sebagai pendukung perdamaian antara Korea Selatan dan Korea Utara   |
| 3 | <i>Taekwondo diplomacy: new possibilities for peace on the Korean Peninsula.</i> | John A. Johnson dan George Vitale, 2018 | Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang ditulis oleh John A. Johnson terdapat pada bagaimana diplomasi olahraga terutama taekwondo dapat menjadi alat dalam menciptakan perdamaian di semenanjung Korea. | Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang ditulis oleh John A. Johnson, dimana diplomasi olahraga masih menjadi fokus utama dalam penelitiannya. Sedangkan, dalam penelitian ini akan membahas bagaimana diplomasi multijalur dapat menjadi alat diplomasi yang kompleks dan dapat mempengaruhi hubungan antar dua Korea ke arah yang |

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
|   |   |   | lebih baik dalam jangka waktu yang panjang.   |
| 4 | <p><i>Pyeongchang Olympics as The Peace Instrument to Encourage The Reconciliation in Korean Peninsula</i></p> <p>Philip Arthur Herdinata, 2019</p> | <p>Kesamaan yang ditemukan dalam penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Philip Arthur Herdinata, terletak pada bagaimana Olimpiade Musim Dingin ke-23 telah memainkan peran dalam menyatukan kedua Korea. Kerjasama yang ada pada track ke v dalam multitrack diplomacy, hal ini menjadikan persamaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya.</p> | <p>Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang ditulis oleh Philip Arthur Herdinata, dimana peran Olimpiade Musim Dingin ke-23 masih menjadi fokus utama dalam penelitiannya. Sedangkan, dalam penelitian ini akan membahas bagaimana diplomasi multijalur dapat menjadi alat diplomasi yang lebih komprehensif dalam menciptakan perdamaian antara dua Korea.</p> |
| 5 | <p><i>The Case for Multilateralism: The Korean Peninsula in a Regional Context</i></p> <p>Niklas Swanström, 2020</p>                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang ditulis oleh Niklas Swanström secara umum terdapat pada pembahasan latar belakang yang memfokuskan pada konflik</li> </ul>  | <p>Perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang ditulis oleh Niklas Swanström terdapat pada orientasi pendekatan diplomasi, dimana penulis Niklas Swanström menyoroti diperlukannya pendekatan secara multilateral yang mana pendekatan ini</p>  |

|  |  |
|--|--|
|  | <p>regional yang memfokuskan pada terjadi di tingkatan kerjasama semenanjung antar negara saja. Korea Sedangkan dalam</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Persamaan penelitian ini peneliti lainnya yaitu, akan memfokuskan penulis pada pendekatan track menyoroti IV dalam konsep bahwa <i>multi-track diplomacy</i> diperlukannya untuk menyelesaikan konflik regional di penyelesaian konflik regional di konflik dengan dua Korea. pendekatan yang lebih komprehensif agar mendapatkan solusi yang luas dan menyeluruh.</li> </ul>   |
| <p><i>A People's Peace: Inclusive</i></p> <p>6. <i>Peacebuilding and the Role of Civil Society in Korea.</i></p> <p>Alec Forss, 2020</p> | <p>Persamaan dari jurnal yang ditulis oleh Alec Forss dan penelitian ini terdapat pada masyarakat sipil menjadi fokus utama dalam bagian pembahasan. Yang mana dengan memberikan peluang kepada masyarakat sipil untuk menjadi pendukung perdamaian bahkan menjadi pembuat keputusan dalam proses perdamaian Korea Utara dan Korea Selatan</p> <p>Perbedaan antara penelitian ini dengan jurnal yang ditulis oleh Alec Forss terdapat pada konsep penelitian, penelitian yang ditulis oleh Alec Forss berfokus pada konsep pendekatan pembangunan perdamaian inklusif sedangkan dalam penelitian ini berfokus pada bagaimana implementasi <i>private citizen</i></p> |

|   |  |                                       |   |
|---|--|---------------------------------------|---|
|   |  |                                       | dalam konflik Korea Selatan dan Korea Utara   |
| 7 | <i>The Samjiyon Orchestra as a North Korean Means for Gender-Based Cultural Diplomacy.</i>   | Pekka Korhonen dan Tomoomi Mori, 2020 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Persamaan dari penelitian yang ditulis oleh Pekka Korhonen dengan penelitian ini terdapat dalam bagaimana keterlibatan diplomasi budaya dalam meredam ketegangan yang terjadi antara Korea Selatan dan Korea Utara</li> <li>• Perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang ditulis oleh Pekka Korhonen terdapat dalam latar belakang masalah yang mana penulis Pekka Korhonen memfokuskan pada bagaimana peran diplomasi budaya Korea Utara, musik, dan peran ansambel musik dalam kegiatan diplomatiknya. Sedangkan, latar belakang masalah dalam penelitian ini berfokus pada konflik Korea Utara dan Korea Selatan.</li> </ul> |
| 8 | <i>Environmental Cooperation as a Peacebuilding Effort on the Korean Peninsula: A Case Study of Wetland and Migratory Bird Collaboration</i> | Hanns Seidel Foundation (HSF), 2020   | <p>Persamaan dari jurnal artikel yang ditulis oleh HSF dengan penelitian ini terdapat pada bagaimana keterlibatan peran masyarakat sipil Korea Utara dan Korea Selatan sebagai</p> <p>Dari jurnal artikel yang ditulis oleh HSF dan penelitian ini terdapat perbedaan yang cukup signifikan dimana dalam jurnal HSF memfokuskan bagaimana kerjasama</p>   |

|  |   |
|--|---|
| <i>between South and North Korea.</i>  | <p>partisipasi dalam lingkungan dapat kegiatan kerjasama mempengaruhi lingkungan yang hubungan baik Korea diselenggarakan oleh Selatan dan Korea HSF juga kedua negara. Utara. Sedangkan, Dari keterlibatan dalam penelitian ini banyak pihak termasuk akan berfokus pada masyarakat sipil bagaimana masyarakat sipil implementasi <i>private citizen</i> dapat membangun kepercayaan dan sebuah resolusi membangun jalur konflik antara Korea komunikasi yang Selatan dan Korea menawarkan banyak Utara. peluang bagi kedua negara.</p>  |
| <p>9 <i>Inter-Korean People-to-People Diplomacy: Social and Cultural Exchanges across the 38th Parallel.</i></p> | <p>Kadir Jun dan Jang, Siyeon 2022</p> <p>Kesamaan dari penelitian yang ditulis oleh Kadir Jun Ayhan dengan penelitian ini yaitu sama sama menyoroti bagaimana peranan tingkatan individu dapat mempengaruhi kebijakan unifikasi antara Korea Selatan dan Korea Utara</p> <p>Perbedaan antara penelitian ini dan penelitian yang ditulis oleh terdapat pada konsep pendekatan diplomasi yang mana penelitian yang ditulis oleh Kadir Jun Ayhan berfokus pada people-to-people diplomacy. sedangkan, penelitian ini akan berfokus pada diplomasi <i>private citizen</i> sebagai aktor utama dalam mendorong menciptakan perdamaian antara Korea Selatan dan Korea Utara.</p> |

|  |   |  |  |  |
|--|---|--|--|--|
|  | <p>10 <i>What are the Consequences of the Social and Cultural Exchanges between the Two Koreas? Insights from an Experimental Study on the Effect of Superordinate Korean Identity.</i></p> | <p>Kadir Jun Ayhan, Sejung Park, Lindsey M. Bier, Han Woo Park, 2022</p> | <p>Bagaimana pertukaran sosial dan budaya antara Korea Utara dan Korea Selatan dapat memengaruhi dinamika sosial dan politik, serta memperkuat upaya untuk menciptakan perdamaian dan persatuan di Semenanjung Korea. Menjadi persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang ditulis oleh Kadir Jun Ayhan dkk.</p>                 | <p>Perbedaan antara penelitian ini dan penelitian yang ditulis oleh Kadir Jun Ayhan terdapat pada pendekatan diplomasi yang mana penelitian yang ditulis oleh Kadir Jun Ayhan dkk berfokus pada <i>people-to-people diplomacy</i>. sedangkan, penelitian ini akan berfokus pada bagaimana konsep diplomasi <i>private citizen</i> menjadi aktor utama dalam menciptakan perdamaian antara dua Korea.</p> |
|  | <p>11 <i>It's Been "Groundhog Day" On the Korean Peninsula for Over 70 Years.</i></p>   | <p>Michael S. Baker dan Jacob B. Baker, 2022</p>                         | <p>Persamaan antara jurnal yang ditulis oleh Michael S. Baker dengan penelitian ini adalah dimana keduanya menekankan pentingnya inisiatif yang dapat melibatkan warga sipil dalam hubungan diplomasi antar-Korea, seperti program bantuan kemanusiaan dan pertukaran budaya. Terlebih dalam jurnal yang ditulis oleh Michael S. Baker</p> | <p>Perbedaan dari antara penelitian ini dan penelitian yang ditulis oleh Michael S. Baker terdapat pada fokus utama penelitian yang mana penelitian yang ditulis oleh Michael S. Baker berfokus pada perlunya perubahan dalam kebijakan luar negeri AS dan Korea Selatan dari yang mengisolasi Korea Utara menuju kebijakan yang lebih proaktif. Sedangkan,</p>  |

---

|  |   |
|--|---|
|  | <p>menyoroti bagaimana penelitian ini akan bantuan kemanusiaan, berfokus pada komunikasi, dan bagaimana perdagangan dapat implementasi menjadi solusi sebagai diplomasi private cara untuk mengakhiri citizen antara Korea isolasi Korea Utara. Selatan dan Korea Utara</p>   |
| <p>12 <i>Chapter Title:</i><br/><i>Taking a Free Ride on the Reunification Train Grassroots' Cost-Benefit Nationalism.</i></p> | <p>Perbedaan dari antara penelitian ini dan penelitian yang ditulis oleh Gil-soo Han terdapat pada Latar belakang masalah memberikan gambaran umum Persamaan antara jurnal mengenai konteks yang ditulis oleh Gil-soo Han dengan sejarah dan kondisi terkini semenanjung penelitian ini adalah Korea, termasuk menyoroti mengenai pembagian antara pentingnya keterlibatan Korea Utara dan langsung warga sipil Korea Selatan, dalam proses diplomasi dampak Perang dan reunifikasi antara Korea, peran partai Korea Selatan dan politik dan ideologi, serta kondisi sosial-ekonomi di kedua negara. Sedangkan, dalam penelitian ini latar belakang masalah lebih fokus terhadap dinamika konflik antara Korea Selatan dan Korea Utara.</p> |

---

## **2.2 Kerangka Teoritis**

Dalam sebuah penelitian, diperlukan suatu kerangka teori sebagai pedoman untuk memastikan bahwa penelitian tersebut memenuhi tuntutan sekaligus membantu peneliti dalam menjelaskan dan menyajikan berbagai tantangan dan temuan. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teori liberalisme untuk melihat hubungan antara Korea Selatan dan Korea Utara dalam mencapai perdamaian di kedua Korea.

### **2.2.1 Liberalisme**

Secara teologis sudut pandang liberalis merupakan sebuah optimisme mengenai potensi perdamaian, kerja sama, dan lembaga internasional dalam sejarah dunia. Menurut Robert Keohane liberalisme cenderung lebih beragam dalam cara pandangnya terhadap hubungan internasional. Liberalisme lebih terbuka terhadap ide bahwa faktor-faktor lain, seperti institusi internasional, kebijakan luar negeri, dan interaksi antara aktor-aktor non-negara, juga memainkan peran penting dalam membentuk dinamika dan pola perilaku dalam politik internasional. Dengan demikian, pendekatan ini menyoroti keanekaragaman dan kompleksitas dalam faktor-faktor yang membentuk dinamika hubungan internasional (Moravcsik, 2019).

Liberalisme dalam teori HI mencakup sejumlah konsep dan argumen tentang bagaimana institusi, perilaku, dan koneksi ekonomi mempengaruhi serta mengurangi kecenderungan kekerasan negara. Sebagai perbandingan dengan realisme dalam teori HI, liberalisme menawarkan pandangan dunia yang lebih optimis. Pada dasarnya, liberalisme berpendapat bahwa jika kekuatan yang sangat besar dan tidak terkendali dibiarkan berkembang, hal itu bisa membahayakan kebebasan individu. Untuk mencegah hal ini, mereka percaya bahwa pengaturan kekuasaan dengan cara yang lebih terkontrol adalah kunci. Mereka mengusulkan penggunaan lembaga-lembaga dan aturan baik di dalam negeri maupun di tingkat internasional sebagai cara utama untuk menjaga kekuasaan agar tidak disalahgunakan (Meiser, 2018).

Perspektif liberalisme telah menghasilkan arah kerjasama antarnegara. Yang mana, melalui kerjasama ini, akan menciptakan pola interdependensi di antara negara-negara yang dapat mempengaruhi kebijakan luar negeri, bukan hanya keputusan

individu tetapi juga hasil dari sistem yang lebih luas. Hal ini menunjukkan bahwa negara jarang akan mengorbankan kekuatan ekonomi atau militer mereka, atau bahkan mengambil risiko kehilangan kedaulatan, hanya untuk mencapai satu tujuan luar negeri (Moravcsik, 2019). Dalam hal ini kaum liberal mengklaim bahwa pola interdependensi di antara preferensi negara merupakan penentu utama tidak hanya kebijakan luar negeri individu, tetapi juga hasil yang bersifat sistemik, merupakan hal yang wajar (Bradley, 2014).

Teori liberal merumuskan bahwa pola interdependensi merupakan rangkaian konsekuensi dan keuntungan yang terjadi bagi masyarakat asing saat kelompok dominan dalam masyarakat tertentu berupaya untuk memenuhi keinginan mereka sendiri. Ini merujuk pada pola dampak lintas batas yang muncul dari upaya untuk mencapai tujuan-tujuan nasional yang berbeda. Teori liberal mengandaikan bahwa pola preferensi negara yang saling terkait memberlakukan pembatasan yang mempengaruhi perilaku negara. Pola interdependensi timbul dari usaha untuk mewujudkan preferensi negara dapat dibagi ke dalam tiga kategori besar, sesuai dengan situasi strategis yang dihasilkan (Moravcsik, 2019).

## **2.3 Kerangka Konseptual**

Dalam sebuah penelitian, diperlukan suatu kerangka konseptual sebagai pedoman untuk memastikan bahwa penelitian tersebut memenuhi tuntutan sekaligus membantu peneliti dalam menjelaskan dan menyajikan berbagai tantangan dan temuan. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan konsep *multi track diplomacy* guna meninjau bagaimana implementasi dari konsep *multi track diplomacy* berjalan untuk menciptakan perdamaian antara Korea Selatan dan Korea Utara.

### **2.3.1 Multitrack Diplomacy**

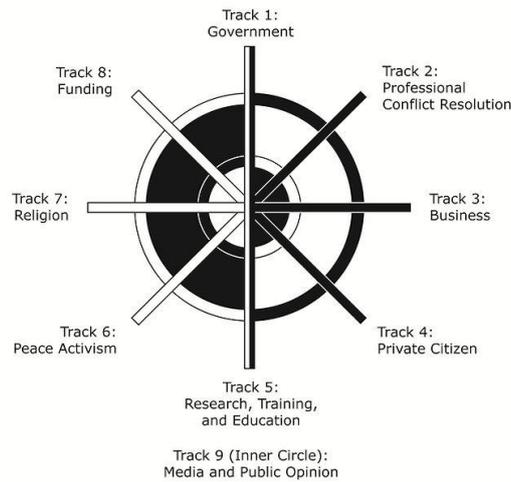
Diplomasi umumnya didefinisikan sebagai hubungan resmi antara dua negara atau lebih yang didorong oleh berbagai faktor seperti ekonomi, sosial budaya, politik, dan keamanan. Diplomasi berperan dalam menjalin hubungan antar individu (*people to people contact*) maupun antar kelompok, membantu sebagai penguatan proses yang menciptakan keseimbangan, sebagai alat dalam memberikan

forum untuk perumusan dan pelaksanaan kebijakan internasional, sebagai alat membangun kerjasama bisnis dan perdagangan di seluruh dunia, dan sebagai alat dalam manajemen bencana juga kesehatan. Diplomasi berperan sebagai salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh kedua belah pihak yang berkonflik untuk menyelesaikan masalah (Firdaus, 2020).

Diplomasi menurut "Random House Dictionary," berarti "Tindakan pejabat pemerintah untuk mengadakan perundingan-perundingan dan hubungan lainnya antara negara-negara; seni atau pengetahuan untuk melakukan perundingan-perundingan tersebut kepandaian untuk mengatur atau melakukan perundingan, menghadapi orang-orang, dengan demikian ada sedikit atau tidak adanya kebijakan yang bersifat dendam." (Setiawan, 2016).

Konsep diplomasi mulai berkembang seiring berjalannya waktu. Diplomasi sekarang tidak lagi terbatas pada aktor negara saja. Namun, saat ini kegiatan diplomasi dapat dilakukan oleh aktor non-pemerintah, bisnis, agama, edukasi, dan lainnya. Hal ini merupakan komponen dari gagasan *Multi Track Diplomacy* (MTD). Konsep ini mengacu pada upaya untuk mencapai perdamaian melalui multijalur. Strategi yang dikembangkan oleh McDonald dan Diamond (1991) melalui buku berjudul *Multi-Track Diplomacy: A Systems Approach to Peace*, memiliki tujuan untuk mengoptimalkan diplomasi melalui berbagai macam aktor. Strategi ini merupakan strategi lanjutan dari jalur pertama, yaitu negara (Chandra, 2018).

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, banyak akademisi baru di bidang hubungan internasional berpendapat bahwa dalam hubungan internasional, aktor terbatas pada presiden, duta besar, menteri, dan perwakilan negara lainnya. Namun, dalam kerangka *multi track diplomacy*, aktor-aktor dalam hubungan internasional jauh lebih beragam (Mujiono & Alexandra, 2019).



**Gambar 2.3.1. 1 Diagram Diplomasi Multitrack**

Berdasarkan perkembangan ini, para akademisi Studi Hubungan Internasional mengembangkan konsep MTD, yang mencakup sembilan aktor atau jalur diplomasi yang memiliki peran unik dan karakteristik khusus dalam mencapai perdamaian dan kemakmuran global. Jalur-jalur ini mencakup berbagai aspek, termasuk:

- 1) *Track I* : Pemerintah, dalam jalur ini upaya penyelesaian konflik akan dilakukan melalui jalur formal yang biasanya melibatkan aktor dalam pemerintahan sebuah negara. Seperti, eksekutif, legislatif, dan yudikatif (Mujiono & Alexandra, 2019).
- 2) *Track II* : *Non-pemerintah/profesional* atau *Peacemaking* melalui Resolusi Konflik, dalam jalur ini kelompok non-pemerintah atau kalangan profesional memiliki peran dalam menciptakan perdamaian dalam sebuah konflik negara. Upaya yang dilakukan biasanya bersifat preventif, pemecahan masalah, dan menjaga hubungan antar negara yang dilakukan oleh kelompok *non-state actors* (Mujiono & Alexandra, 2019).
- 3) *Track III* : Bisnis atau *Peacemaking* melalui Perdagangan, peran bisnis dalam sebuah konflik antar negara juga memiliki peran penting dalam menciptakan perdamaian. Kegiatan bisnis dinilai dapat mengurangi ketegangan dan kesenjangan ekonomi yang terjadi di antara masyarakat (Mujiono & Alexandra, 2019).
- 4) *Track IV* : Warga Negara or *Peacemaking* melalui keterlibatan *private citizen* diplomasi ini merupakan kegiatan yang biasanya dilakukan oleh para

individu atau masyarakat untuk mewujudkan perdamaian. Keterlibatan masyarakat dalam upaya penyelesaian konflik memiliki peran yang penting untuk memicu adanya perdamaian. Dalam kegiatan ini biasanya masyarakat mengikuti program pertukaran pemuda, Volunteer, non-government organization, serta kegiatan lainnya yang memiliki visi dan misi untuk menciptakan perdamaian (Mujiono & Alexandra, 2019).

- 5) *Track V* : Studi, Pendidikan, dan Pelatihan, atau *Peacemaking* melalui Pendidikan, pada jalur ini, komunitas akademisi dan peneliti turut berperan dalam menciptakan perdamaian. Dalam upaya ini, mereka memiliki tiga tujuan: 1) melakukan penelitian yang melibatkan akademisi dan kelompok *think tank*, 2) memberikan pelatihan kepada kelompok masyarakat tertentu mengenai teknik bernegosiasi, diplomasi, mediasi, resolusi konflik, dan peran sebagai pihak ketiga dalam penyelesaian masalah, seperti menjadi fasilitator; dan 3) memberikan pendidikan melalui program pendidikan dari tingkat taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi dengan kurikulum yang menekankan pada penghargaan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) dan sikap toleransi (Mujiono & Alexandra, 2019).
- 6) *Track VI* : Aktivisme atau *Peacemaking* melalui advokasi, dalam jalur ini, aktor yang berupaya mencapai perdamaian adalah individu atau kelompok yang berjuang untuk kepentingan masyarakat di bidang-bidang tertentu, seperti pejuang lingkungan, advokat hak asasi manusia, pembela kesetaraan gender, dan kelompok lainnya. Selain itu, mereka menggunakan pendekatan yang khas dalam menjaga tujuan mereka, yaitu dengan mendapatkan dukungan dari berbagai pihak (Mujiono & Alexandra, 2019).
- 7) *Track VII* : Agama atau *Peacemaking* melalui tindakan iman, dalam MTD, para pemuka memiliki peran yang lebih besar dari sekedar pengayom umatnya. Para pemuka agama, seperti yang kita ketahui, memiliki pengikut yang sangat besar, sehingga mereka memiliki pengaruh yang signifikan terhadap mereka. Peran pemimpin agama menjadi sangat penting dalam mempromosikan perdamaian dalam MTD, terutama dalam menangani konflik komunal yang terjadi di dalam sebuah negara (Mujiono & Alexandra, 2019).

- 8) *Track VII* : Pendanaan or *Peacemaking* melalui penyediaan sumber daya, para penyedia dana seringkali dikaitkan dengan para filantropis yang berusaha memfasilitasi jalur atau orang-orang yang berjuang untuk perdamaian. Banyak lembaga donor ini juga bekerja sama dengan kelompok masyarakat untuk memperjuangkan masalah tertentu. Misalnya, masalah lingkungan, hak asasi manusia, dan kesetaraan gender (Mujiono & Alexandra, 2019).
- 9) *Track IX* : Komunikasi dan Media atau *Peacemaking* melalui Informasi, media dinilai sangat penting dalam mewujudkan perdamaian. Media memiliki sisi baik dan buruk. Media yang dikelola oleh individu yang mencintai perdamaian akan menghasilkan konten yang mendukung perdamaian. Namun, media juga cenderung dipenuhi dengan provokasi jika dimiliki oleh orang yang menyukai pertikaian. Terlebih saat ini, kemajuan dalam teknologi informasi dan informatika membuat media mudah diakses di mana saja dan kapan saja. Oleh karena itu, media memainkan peran yang sangat penting dalam menentukan apakah sebuah negara atau wilayah damai. Media juga digunakan untuk menyampaikan kritikan, pendapat, atau masukan kepada pemerintah dan kelompok-kelompok tertentu, karena media adalah sarana untuk menyambung lidah masyarakat (Mujiono & Alexandra, 2019).

#### **2.3.1.1 *Private Citizen***

*Private Citizen*, juga dikenal sebagai masyarakat sipil tingkatan ini memainkan peran penting dalam strategi *multi track diplomacy* yang dikembangkan oleh McDonald dan Diamond pada tahun 1991 melalui buku berjudul *Multi-Track Diplomacy: A Systems Approach to Peace*, memiliki tujuan untuk mengoptimalkan diplomasi melalui. Pada awalnya peran *Private Citizen* termasuk kedalam track II, namun pada tahun 1990-an John Mc Donald dan Louise Diamond memperluas gagasan diplomasi Jalur II menjadi kerangka kerja yang lebih komprehensif yang mencakup beberapa jalur atau jalur di mana pembangunan perdamaian dan resolusi konflik dapat terjadi (Mujiono & Alexandra, 2019).

Dalam peranannya *private citizen* merupakan aktor yang sangat vital sebagai aktor diplomasi yang dimana peran dari masyarakat sipil dapat menjadi sebuah perantara yang luas. Mereka memainkan peran penting dalam situasi di mana komunikasi resmi sulit atau tidak mungkin, menawarkan kerahasiaan, keahlian, dan kemampuan untuk membangun hubungan berdasarkan kepercayaan pribadi. Praktik ini pernah terjadi Pada awal 1990-an, warga negara Norwegia memainkan peran penting dalam mendirikan "saluran belakang" antara Palestina dan Israel, yang membantu memfasilitasi dialog dan negosiasi informal (Sharp, 2001).

Selain itu, praktik-praktik ini pernah terjadi di Korea Utara, dimana Korea Utara Meskipun Korea Utara adalah negara tertutup dan penuh tantangan untuk diplomasi tradisional, ini justru menjadi tempat yang ideal untuk diplomasi warga negara, yang dapat menjangkau dengan cara yang lebih fleksibel dan informal. seperti yang terjadi pada tahun 90-an dimana berbagai LSM yang mulai beroperasi di Korea Utara pada dekade ini, mulai beralih dari sekadar memberikan bantuan pangan menuju memfasilitasi pertukaran teknis dan membangun jaringan dukungan. Ini menandai awal dari diplomasi warga negara yang lebih luas dan terorganisir di Korea Utara, tidak hanya disitu terdapat kegiatan kolaborasi konsorsium sains antara Korea Utara-As pada tahun 2007, dimana kegiatan ini bertujuan untuk mengejar proyek-proyek ilmiah kolaboratif antara AS dan Korea Utara. Terdapat juga Proyek Pyongyang yang didirikan pada tahun 2009 oleh dua orang Kanada. Tujuan dari proyek ini adalah untuk membangun kontak lintas batas antara Korea Utara dan negara lain dalam bidang pengembangan manusia, pendidikan, dan pariwisata, proyek ini bertujuan untuk membangun hubungan dan komunikasi antara Korea Utara dan komunitas internasional. Ini dilakukan melalui berbagai kegiatan dan program yang berfokus pada pengembangan manusia, pendidikan, dan pariwisata (Scott-Smith, 2014). Contoh-contoh sejarah menunjukkan bagaimana peran ini telah berkontribusi pada diplomasi internasional, terutama dalam situasi yang sensitif atau kompleks.

Aktor Private Citizen dalam cakupan MTD terlibat dalam upaya pembangunan perdamaian dan pembangunan melalui keterlibatan pribadi. Keterlibatan ini mencakup berbagai bentuk seperti diplomasi warga, program pertukaran, organisasi sukarela swasta, organisasi non-pemerintah, dan kelompok kepentingan khusus. Melalui jalan-jalan ini, warga negara berkontribusi pada inisiatif perdamaian dan pembangunan dengan berpartisipasi aktif dan mempromosikan dialog dan kerja sama lintas batas (Chandra, 2018).

Efektivitas warga negara dalam menangani masalah berasal dari keterlibatan mereka dalam berbagai organisasi dan asosiasi yang secara langsung berdampak pada hubungan internasional. Selain itu, warga negara menggunakan strategi khusus untuk mengatasi berbagai masalah. Salah satunya adalah menangani masalah dari tingkat “*grassroot*”, yang menekankan pada aspek dasar masalah untuk menemukan solusi. Aktor-aktor ini dapat membangun hubungan pribadi dengan orang-orang dari berbagai latar belakang negara dan budaya karena mereka memiliki jaringan yang luas yang mencakup banyak negara. *Private Citizen* bekerja untuk menghilangkan stereotip dan memupuk persahabatan dengan menangani masalah bersama. Dalam praktiknya, mereka menyediakan sumber daya dan pelatihan khusus yang diperlukan untuk mendukung perdamaian dan kemajuan internasional, terutama di bidang kebijakan publik dan pengambilan keputusan (Mujiono & Alexandra, 2019).

Selama Perang Dingin, diplomasi warga negara pribadi dianggap penting untuk menyatukan orang melalui program pertukaran untuk mengurangi emosi negatif dengan "memanusiakan" kedua negara. Jaringan koneksi manusia seperti ini, yang terutama didanai oleh pemerintah dapat membantu dalam perundingan dan percakapan resmi. Meskipun dunia semakin digital dan jaringan yang memungkinkan pesan dikirim secara global, faktor manusia tetap dianggap penting dalam diplomasi publik, yang

bertujuan untuk membangun dan memperluas hubungan dengan khalayak asing. (K. S. Lee, 2018).

Diplomasi *private citizen* menekankan dua dimensi utama yaitu sebagai siapa atau apa yang diwakili dan kepada siapa representasi itu diarahkan dalam upaya mereka untuk memfasilitasi dialog, mengatasi masalah, dan mempromosikan perdamaian serta kerja sama internasional. Misalnya, seorang diplomat warga negara mungkin terlibat dalam pertukaran budaya antara komunitas kota di dua negara berbeda (sub-negara), atau bekerja dengan organisasi lingkungan internasional untuk mengatasi perubahan iklim (supra-negara), atau berpartisipasi dalam jaringan NGO global yang berfokus pada hak asasi manusia (trans-negara). Sedangkan dalam hal penerima representasi, diplomat warga negara mengklaim mewakili mereka yang mereka wakili dalam berbagai iterasi komunitas internasional serta negara dan aktor non-negara (Sharp, 2001).

*Private Citizen*, dianggap sebagai sumber kekuatan alternatif di luar kekuasaan pemerintah. Jalur ini memiliki kekuatan karena keanggotaan globalnya, yang memungkinkannya menjadi "*people power*" yang dapat memperjuangkan kepentingan mereka di luar aturan masyarakat. Warga negara, memiliki kemampuan untuk melakukan tugas pemerintah, terutama dalam hal penyebaran informasi secara internasional dan bertindak sebagai perantara. Mereka menjalin hubungan yang bergantung satu sama lain dan sejajar dengan pemerintah. Selain itu, warga negara swasta berfungsi sebagai pengawas pemerintah, yang memantau dan mengevaluasi kebijakan pemerintah untuk memastikan akuntabilitas.

MTD (*Multi Track Diplomacy*) merupakan instrumen yang dapat digunakan untuk mempromosikan perdamaian di seluruh dunia, terutama dalam konteks negosiasi dan diplomasi. Berbagai jalur yang tersedia dalam MTD, mulai dari jalur pertama hingga jalur kesembilan, merupakan beragam upaya yang dapat dilakukan untuk mencapai kesepakatan atau perdamaian antarnegara. Dengan banyaknya jalur yang tersedia dan partisipasi dari berbagai pihak, MTD dianggap

sebagai sebuah instrumen yang sangat penting dalam mencapai perdamaian. (Mujiono & Alexandra, 2019).

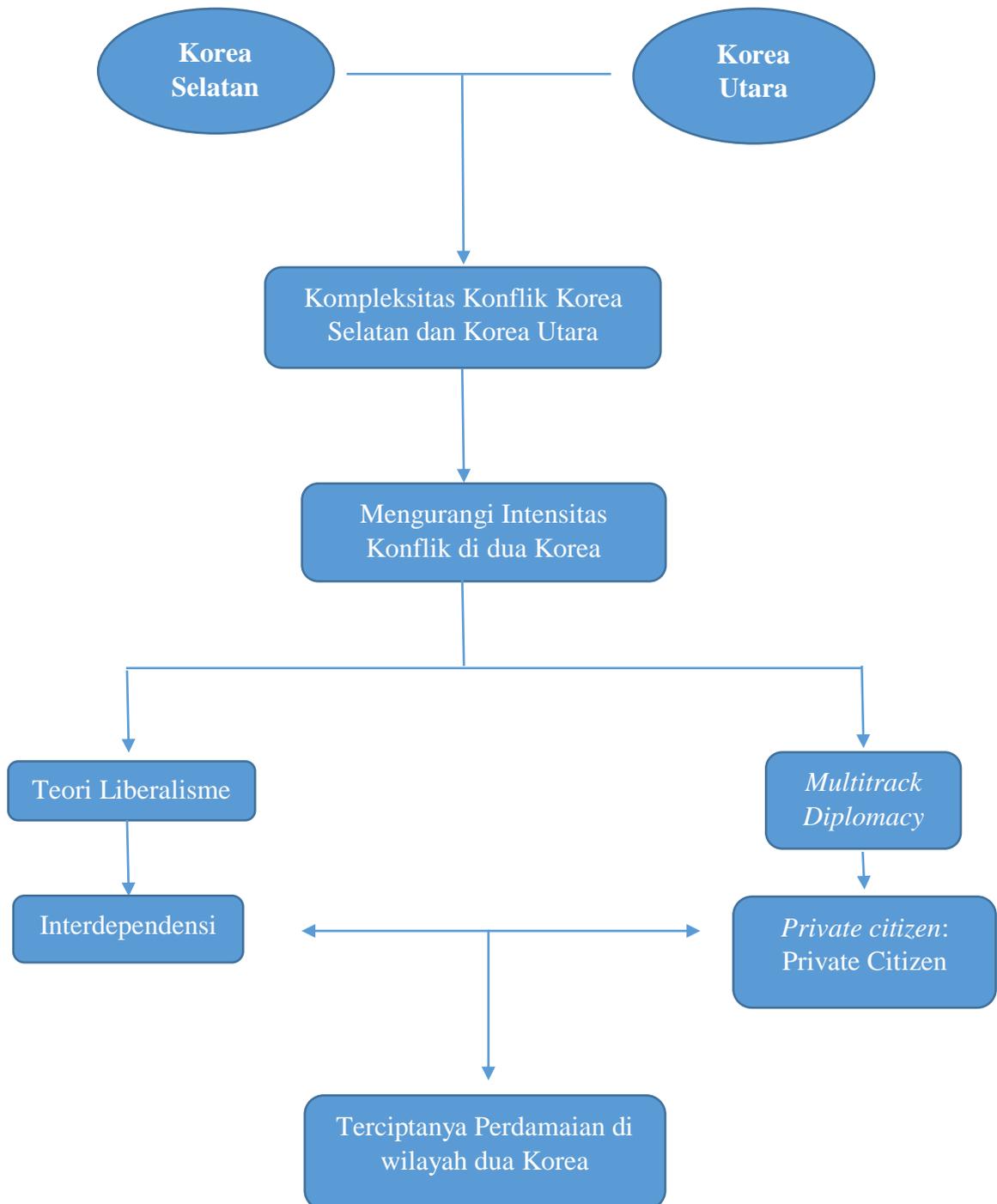
## 2.4 Asumsi

Dinamika konflik antara Korea Selatan dan Korea Utara telah menyebabkan ketegangan jangka panjang dalam hubungan kedua negara. Konflik yang diawali oleh Perang Korea pada tahun 1950-1953 yang kemudian berkembang menjadi persaingan wilayah, tindakan provokatif dari kedua belah pihak, serta krisis nuklir yang dipicu oleh Korea Utara. Akibatnya, hubungan kedua negara selalu berada dalam ketegangan yang tak kunjung reda. Meskipun telah dilakukan berbagai upaya komunikasi antara kedua negara (*government to government*), hingga saat ini normalisasi hubungan masih sulit dicapai. Maka, dibutuhkan pendekatan diplomasi yang tidak biasa untuk menciptakan perdamaian di wilayah dua Korea.

Penulis berasumsi bahwa dengan membangun hubungan kerjasama yang melibatkan warga sipil sebagai pendukung perdamaian, dapat menjadi pemicu terciptanya perdamaian jangka panjang antara Korea Selatan dan Korea Utara. Didorong oleh konsep diplomasi *private citizen*, terlibatnya individu dan kelompok non-pemerintah dalam upaya diplomasi, dapat memainkan peran penting dalam membangun rasa saling percaya (*mutual trust*) antara masyarakat kedua negara. Semakin banyak praktik diplomasi ini dijalankan, maka semakin besar peluang tumbuhnya kepercayaan dan pemahaman yang dapat mengubah pandangan pemerintah Korea Selatan dan Korea Utara.

Berangkat dari teori liberalisme kerjasama antar kedua negara berkonflik membangun pola interdependensi antar kedua negara, sehingga praktik diplomasi *private citizen* dapat menjadi peluang positif dalam menangani konflik regional di Semenanjung Korea. Dengan meningkatkan interaksi dan kerjasama antara warga sipil, diharapkan dapat menciptakan suasana yang lebih kondusif untuk berdialog dan mendorong upaya perdamaian jangka panjang di kedua negara.

## 2.5 Kerangka Analisis



Dinamika konflik yang terjadi antara Korea Selatan dan Korea Utara mengakibatkan kedua negara terus menerus berada dalam ketegangan. Yang akhirnya, berdampak buruk pada stabilitas di wilayah dua Korea, konflik yang didorong oleh sejumlah faktor yang kompleks, seperti adanya perbedaan ideologi, konflik regional dan ketegangan geopolitik. Ketiga komponen ini menimbulkan tantangan tambahan yang memicu munculnya kompleksitas konflik lainnya dalam kedua hubungan negara tersebut. Hal ini, telah menuntut penyelesaian antar kedua negara untuk mewujudkan perdamaian di Korea Selatan dan Korea Utara.

Dari perspektif liberalisme, penyelesaian konflik antara Korea dapat dicapai melalui kegiatan kerjasama antar negara (*government-to-government*). Yang nantinya akan menghasilkan pola interdependensi antar negara. Tetapi, Melihat dari kompleksnya permasalahan antara Korea Utara dan Korea Selatan, kerjasama antar pemerintahan saja tidak cukup dan dibutuhkannya penyelesaian yang tidak hanya melibatkan pemerintah saja tetapi juga perlu melibatkan pendekatan dari tingkat “grassroot” yang mengacu pada peran masyarakat sipil atau dapat disebut diplomasi *private citizen*, yang terkandung dalam konsep *Multitrack Diplomacy* (MTD). Keterlibatan warga sipil sebagai pendukung perdamaian diharapkan dapat memberikan pandangan yang lebih positif bagi pemangku kepentingan kedua negara. Sehingga, jenis diplomasi ini dapat memberikan dampak terhadap terciptanya perdamaian jangka panjang antara Korea Selatan dan Korea Utara.